



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
*Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 07/DP3APPKB/I/2020

**T E N T A N G**  
**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA APLIKASI LOGOS**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG.**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu melakukan Pengangkatan Pejabat Pengelola Aplikasi Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;  
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan PERTAMA : Pengangkatan Pejabat Pengelola Aplikasi Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : User/Operator Logos SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
2. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP)
3. Membuat Surat Tanda Setoran (STS)
4. Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5. Membuat Laporan Operasional (LO)
6. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Membuat Neraca
8. Membuat CALK
9. Menyusun Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

KETIGA : Hasil pelaksanaantugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2020



Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 07/DP3APPKB/I/2020

TANGGAL : 7 Januari 2020

**T E N T A N G**  
**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA APLIKASI LOGOS**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA/NIP	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
1	2	3	4
1.	Surahmy Nurdin, S.Pt 19790908 200801 2 018	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	User Logos Penganggaran

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 7 Januari 2020



**Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM**

Pangkat: Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001